

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.1/8185/Sj 15 November 2022 Perihal Tanggapan

 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA		 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	
Jakarta, 15 November 2022		Jakarta, 15 November 2022	
Yth. Gubernur Jawa Timur		Yth. Gubernur Jawa Timur	
di –		di –	
Surabaya		Surabaya	
Nomor : 100.3.1.1/8185/Sj	Sifat :	Nomor : 100.3.1.1/8185/Sj	Sifat :
Lampiran :	Lampiran :	Lampiran :	Lampiran :
Hal : Tanggapan	Hal : Tanggapan	Hal : Tanggapan	Hal : Tanggapan

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 140/7512/112.4/2022 tanggal 30 Mei 2022 Perihal Surat Bupati Sidoarjo Terkait Pemohonan Diskresi Ketentuan Pasal 76 Ayat 2 Permendagri 1 Tahun 2017 pada Penggabungan Desa Terdampak Lumpur Sidoarjo, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa dalam hal penggunaan diskresi mengacu pada ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemandirian dan kepentingan umum. 2. Selanjutnya, dalam hal penggunaan diskresi harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dijelaskan lebih lanjut pada Bab XI tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja dalam Bagian Kedua tentang Administrasi Pemerintahan bahwa penggunaan diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; b. sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik; c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan e. dilakukan dengan itikad baik. 3. Berdasarkan penjelasan poin 1 dan 2 di atas, maka sehubungan dengan usulan Saudara terkait permohonan diskresi ketentuan pasal 76 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa pada penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo dapat dilanjutkan dengan mengecualikan ketentuan pada pasal tersebut yang mengamanatkan bahwa Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk pejabat kepala Desa sesuai usulan Bupati Sidoarjo berdasarkan Surat Bupati Sidoarjo Nomor 130/10365/438.1.1/2021 tanggal 16 November 2021 Perihal Pemohonan	Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 140/7512/112.4/2022 tanggal 30 Mei 2022 Perihal Surat Bupati Sidoarjo Terkait Pemohonan Diskresi Ketentuan Pasal 76 Ayat 2 Permendagri 1 Tahun 2017 pada Penggabungan Desa Terdampak Lumpur Sidoarjo, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa dalam hal penggunaan diskresi mengacu pada ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemandirian dan kepentingan umum. 2. Selanjutnya, dalam hal penggunaan diskresi harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dijelaskan lebih lanjut pada Bab XI tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja dalam Bagian Kedua tentang Administrasi Pemerintahan bahwa penggunaan diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; b. sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik; c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan e. dilakukan dengan itikad baik. 3. Berdasarkan penjelasan poin 1 dan 2 di atas, maka sehubungan dengan usulan Saudara terkait permohonan diskresi ketentuan pasal 76 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa pada penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo dapat dilanjutkan dengan mengecualikan ketentuan pada pasal tersebut yang mengamanatkan bahwa Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk pejabat kepala Desa sesuai usulan Bupati Sidoarjo berdasarkan Surat Bupati Sidoarjo Nomor 130/10365/438.1.1/2021 tanggal 16 November 2021 Perihal Pemohonan
---	---

Lampiran 2 Wawancara dengan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

P. Andjar Pj. Sekda Sidoarjo

assalamualaikum pak 20.56 ✓

mohon ijin berkenaan dengan keperluan tesis saya tentang implementasi penggabungan desa/kelurahan pada wilayah terdampak lumpur mohon berkenan untuk kiranya bapak menjadi narasumber dalam penelitian saya. 20.57 ✓

No Indikator Implementasi Pertanyaan

1 Program 1 Apa saja program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo

2 Mengapa program tersebut diadakan?

3 Siapa saja OPD pelaksana dalam program tersebut?

4 Bagaimana tanggapan dari adanya program tersebut?

5 Bagaimana alokasi waktu yang dalam implementasi program tersebut?

6 Bagaimana kebijakan pemangku kepentingan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

7 Apa masih terdapat program terkait dengan fasilitasi permasalahan penggabungan Desa/Kelurahan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?

8 Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo

9 Bagaimana teknis pemberhentian dan pemberian pesangon BPD pada Desa terdampak?

2 Organisasi Pelaksana 1 Siapa aja OPD yang menjadi pelaksana program dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo

2 Bagaimana pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur yang dilakukan oleh masing-masing OPD

3 Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo

4 Bagaimana bentuk evaluasi terhadap program tersebut? Edited 20.58 ✓

1. Vertek batas wilayah, sosialisasi, pntaan dok kepend, inv aset, pembrhntn BPD
2. Imp perbup 1 & 4 202
3. Pemkah sbg fasltsi lain2 capil pmd camat desa klrh
4. Sjk thn 2006 ganti rugi selesai 2k21.prg sbg tgn perbup tsb
5. Sesuai renaksi
6. Dsuaiikan aturan karna baru di sda
7. Ganti rugi aset
8. Masy krg phm, aturan belum tercover
9. Bpd ds ind sdh pnh dbri 2.5jt sesuai permen [110 2016](#)

1. Sm sptti diatas
2. Baik
3. Sm

4. 21.09

4 Bagaimana bentuk evaluasi terhadap program tersebut? Edited 20.58 ✓

1. Vertek batas wilayah, sosialisasi, pntaan dok kepend, inv aset, pembrhntn BPD
2. Imp perbup 1 & 4 202
3. Pemkah sbg fasltsi lain2 capil pmd camat desa klrh
4. Sjk thn 2006 ganti rugi selesai 2k21.prg sbg tgn perbup tsb
5. Sesuai renaksi
6. Dsuaiikan aturan karna baru di sda
7. Ganti rugi aset
8. Masy krg phm, aturan belum tercover
9. Bpd ds ind sdh pnh dbri 2.5jt sesuai permen [110 2016](#)

1. Sm sptti diatas
2. Baik
3. Sm
4. 21.09

You deleted this message. 21.10

You deleted this message. 21.10

You deleted this message. 21.10

Forwarded
Evaluasi pemkab :
Memastikan pemerintahan berjalan tanpa kendala / lancar
Lebih efektif 21.10

Forwarded
Memastikan proses perubahan administrasi berjalan lancar, 21.10

Forwarded
Memastikan penataan wilayah pada desa/kelurahan terdampak mampu menghilangkan kebingungan masyarakat atas distorsi persepsi tentang wilayah, kependudukan dll di wilayah terdampak 21.10

Kembangkan sndri ya 21.11

Sesuai yg km krjakan di pemerintahn 21.11

siap pak terimakasih untuk waktunya 21.12 ✓

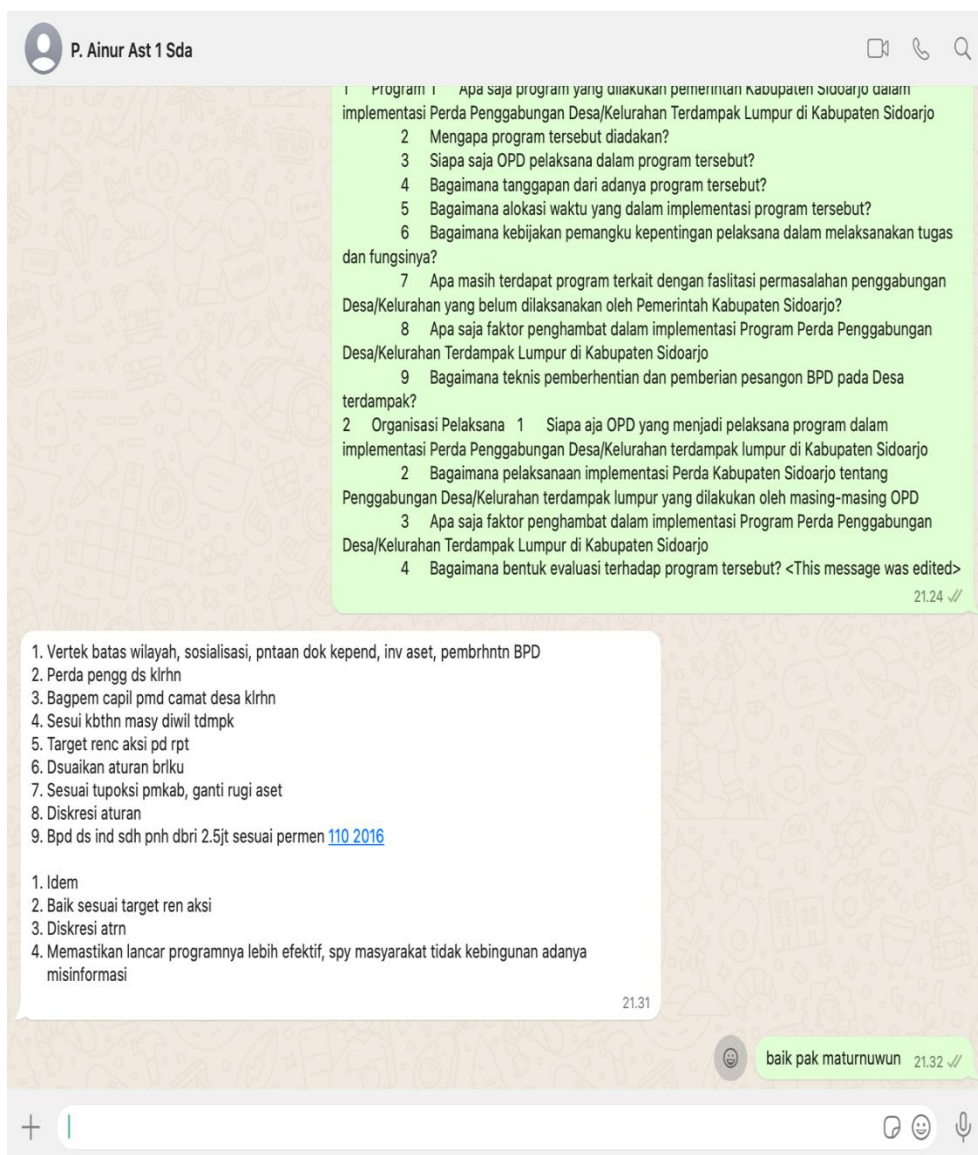
Lampiran 3 Wawancara bersama Camat Wilayah Terdampak



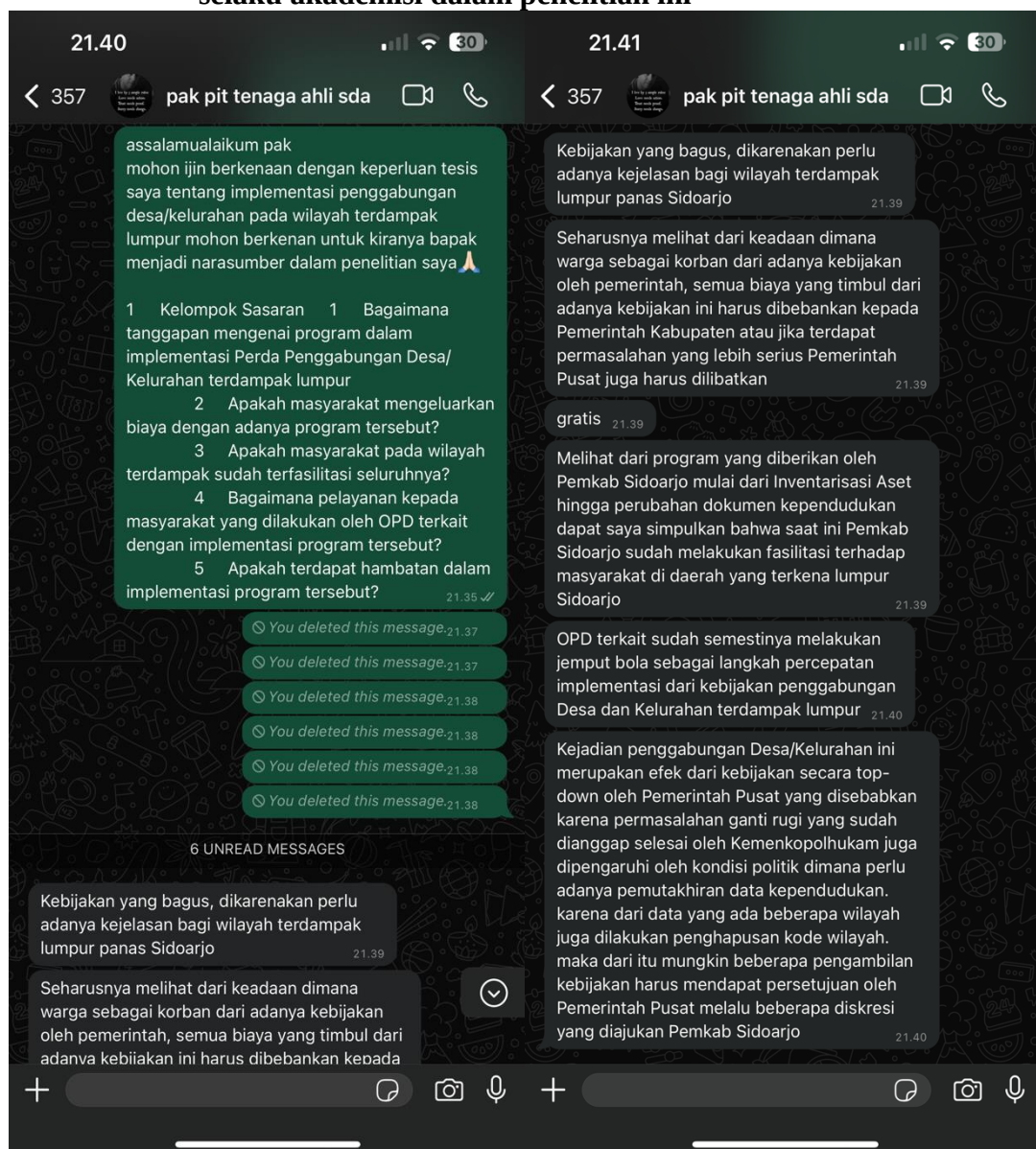
Lampiran 4 Wawancara Bpk. Asmara Hadi S.STP., M.AP Selaku Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo



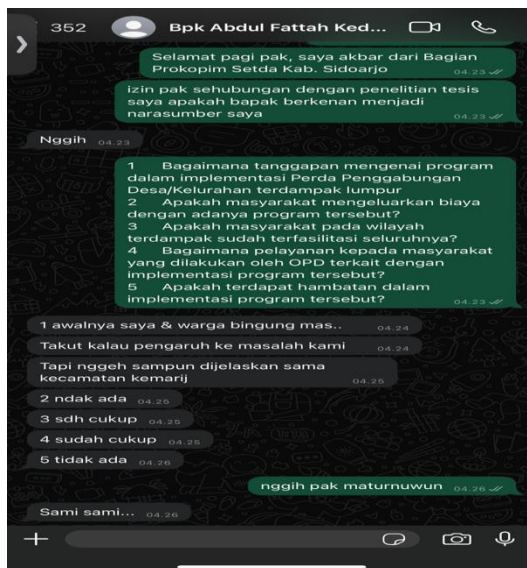
Lampiran 5 Wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo



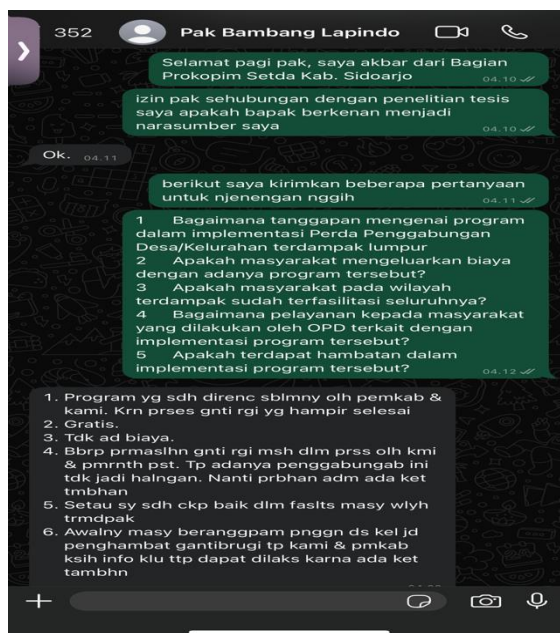
Lampiran 6 Wawancara dengan Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME Dosen Universitas Trunojo & Tenaga Ahli Bupati Sidoarjo selaku akademisi dalam penelitian ini



Lampiran 7 Wawancara dengan Bpk. Abdul Fattah Pemilik Pondok Pesantren Tahfidz Al-Tahdzib



Lampiran 8 Wawancara dengan Bpk. Bambang Suharto dari PT. Minarak Lapindo Jaya



Lampiran 9 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Andjar Surjadiano, S.Sos., CGCAE.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	
2	Mohammad Ainur Rahman, AP, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	
3	Asmara Hadi, S.STP., M.AP.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
4	Choirul Anam, S.STP., M.HP.	Camat Porong	
5	Sabino Mariano, S.Sos., M.KP.	Camat Tanggulangin	
6	Dedik Irwanto, S.Sos.	Camat Jabon	
7	Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME	Dosen Universitas Trunojo & Tenaga Ahli Bupati Sidoarjo	
8	Bambang Suharto	PT. Minarak Lapindo Jaya	
9	Abdul Fattah	Pendiri Pondok Pesantren Tahfidz Al-Tahdzib	
10	Candra Yudistira	Admin Media Sosial "Dolordarjo"	
11	Ibu Nyaris	Warga Kelurahan Mindi	Kelurahan Terdampak
12	Bapak Tajir	Warga Kelurahan Siring	Kelurahan Terdampak
13	Bapak Rizal	Warga Kelurahan Jatirejo	Kelurahan Terdampak
14	Ibu Sri Utami	Warga Desa Renokenongo	Desa Terdampak
15	Ibu Diana	Warga Desa Kedungbendo	Desa Terdampak

16	Bapak Ikhwan	Warga Desa Besuki	Desa Terdampak
17	Bapak Zainul	Warga Desa Pejarakan	Desa Terdampak

Lampiran 10 Matrik wawancara

Pertanyaan untuk Narasumber :

1. Andjar Surjadio, S.Sos., CGCAE. Selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Mohammad Ainur Rahman, AP, M.Si selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Asmara Hadi, S.STP., M.AP. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Choirul Anam, S.STP., M.HP. selaku Camat Porong
5. Sabino Mariano, S.Sos., M.KP. selaku Camat Tanggulangin
6. Dedik Irwanto, S.Sos. selaku Camat Jabon

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	
1	Program	1	Apa saja program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo
		2	Mengapa program tersebut diadakan?
		3	Siapa saja OPD pelaksana dalam program tersebut?
		4	Bagaimana tanggapan dari adanya program tersebut?

		5	Bagaimana alokasi waktu yang dalam implementasi program tersebut?
		6	Bagaimana kebijakan pemangku kepentingan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?
		7	Apa masih terdapat program terkait dengan faslitasi permasalahan penggabungan Desa/Kelurahan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?
		8	Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo
		9	Bagaimana teknis pemberhentian dan pemberian pesangon BPD pada Desa terdampak?
2	Organisasi Pelaksana	1	Siapa aja OPD yang menjadi pelaksana program dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo
		2	Bagaimana pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur yang dilakukan oleh masing-masing OPD
		3	Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo
		4	Bagaimana solusi dari adanya hambatan dalam implementasi program tersebut?

Pertanyaan untuk Narasumber :

1. Tripitono Adi Prabowo selaku Dosen Universitas Trunojo & Tenaga Ahli Bupati Sidoarjo
2. Candra Yudistira selaku Admin Media Sosial "Dolordarjo"
3. Ibu Nyaris selaku Warga Kelurahan Mindi
4. Bapak Tajir selaku Warga Kelurahan Siring
5. Warga Kelurahan Jatirejo
6. Ibu Utami selaku Warga Desa Renokenongo
7. Ibu Diana selaku Warga Desa Kedungbendo
8. Warga Desa Besuki
9. Warga Desa Pejarakan
10. Abdul Fattah selaku Pendiri Pondok Pesantren Tahfidz Al-Tahdzib
11. Bambang Suharto dari PT. Minarak Lapindo Jaya

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	
1	Kelompok Sasaran	1	Bagaimana tanggapan mengenai program dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur
		2	Apakah masyarakat mengeluarkan biaya dengan adanya program tersebut?
		3	Apakah masyarakat pada wilayah terdampak sudah terfasilitasi seluruhnya?
		4	Bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh OPD terkait dengan implementasi program tersebut?

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	
		5	Apakah terdapat hambatan dalam implementasi program tersebut?

MATRIK ANALISIS DATA PENELITIAN

Judul	:	Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo Di Kabupaten Sidoarjo
Rumusan Masalah	:	1. Bagaimana implementasi kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo?
		2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo?
Metode Penelitian	:	Deskriptif Kualitatif

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
1	Program	1	Apa saja program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo Verifikasi Batas wilayah, sosialisasi penataan wilayah, penataan dokumen kependudukan, inventarisasi aset, dan pemberhentian BPD					

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN						
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI	
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)	
		2	Mengapa program tersebut diadakan?	Program tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 untuk Penggabungan Kelurahan di wilayah terdampak Lumpur Sidoarjo dan	Adanya Perda di Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur	Sebagai implementasi dari adanya Perda Kab. Sidoarjo tentang penggabungan Desa dan Kelurahan di wilayah terdampak lumpur Sidoarjo	Implementasi Perbup Penggabungan Desa dan Kelurahan di wilayah terdampak lumpur Sidoarjo	Tindak lanjut dari Perbup Penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo	Implementasi Perbup Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggabungan Desa di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

No	Indikator Implemen tasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintaha n Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
			Pertaturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 untuk penggabungan Desa di wilayah terdampak Lumpur Sidoarjo					

		3	Siapa saja OPD pelaksana dalam program tersebut	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab untuk melakukan fasilitasi kepada masyarakat sebagai implementasi adanya Perbup tersebut. Secara lebih teknis di masing-masing program dilakukan oleh OPD teknis seperti Perubahan dokumen kependudukan oleh	Bagian Pemerintahan dan BIG dalam kaitan dengan verifikasi batas wilayah, sosialisasi penataan wilayah dan inventarisasi aset oleh DPMD, Bagian Pemerintahan, dan Camat setempat. Penataan dokumen kependudukan oleh Dispendukcapil, dan Pemberhenti	Saya melakukan verifikasi teknis ke BIG untuk program verifikasi batas wilayah, untuk yang lain sudah dilakukan oleh OPD teknis seperti DPMD dan Camat setempat	DPMD, Bagian Pemerintahan dan Camat	Kalau teknis dipegang oleh DPMD, Bagian Pemerintahan dan Saya selaku Camat	DPMD, Bagian Pemerintahan dan Camat
--	--	---	---	--	--	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------

				Dispendukc apil, Sosialisasi penataan wilayah dan Inventarisas i Aset oleh DPMD Bagian Pemerintaha n dan Camat setempat, Pemberhenti an BPD oleh Desa dan Camat, Verifikasi Batas Wilayah oleh Bagian Pemerintaha n dan Badan Informasi Geospasial. Secara keseluruhan masing-	an BPD oleh masing- masing Desa dan Camat				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				masing OPD teknis tetap melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati selaku Kepala Daerah.					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

No	Indikator Implemen tasi	Pertanyaan	JAWABAN						
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI	
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintaha n Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)	
		4	Bagaimana tanggapan dari adanya program tersebut?	Fenomena semburan Lumpur Panas di Kabupaten Sidoarjo sudah terjadi sejak tahun 2006, proses ganti rugi sampai tahun 2021 telah dilaksanak an oleh Pemerintah Pusat dan dinyatakan	Program ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo	Program yang baik dan difasilitasi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.	Programnya sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Ketapang dan Kedungben do.	Pemkab Sidoarjo sudah melakukan fasilitasi ke masyarakat secara langsung melalui program yang dilakukan saat ini dan masyarakat sangat terbantu	Masyarakat di wilayah terdampak sangat terbantu dengan adanya program ini.

No	Indikator Implemen tasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintaha n Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
			selesai. Adanya program ini menanggapi adanya kebijakan penggabung an Desa dan Kelurahan yang tertuang dalam Perbup Sidoarjo Nomor 1 dan 3 Tahun 2023.					

		5	Bagaimana alokasi waktu yang dalam implementasi program tersebut?	Alokasi waktu sudah disepakati bersama melalui rapat bersama OPD teknis, Camat dan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Kesepakatan dalam rapat beberapa waktu lalu kami terus kejar agar waktunya sesuai dengan yang telah disepakati dan masyarakat juga	Kami sudah masukkan target waktu di masing-masing program pada saat rapat dengan pemangku kebijakan.	Alokasi waktu sangat diperhatikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Di masing-masing pelaksanaan program telah ditetapkan target waktu pelaksanaan juga	alokasi waktu sudah disepakati bersama, tiap minggu kami selalu laporkan tindak lanjut dari adanya program tersebut	kalau waktu sudah ada kesepakatan saat rapat diawal, kami melakukan pendampingan adanya program tersebut karena termasuk kedalam wilayah kami	Sudah diatur pada saat rapat diawal dan juga sudah ditetapkan untuk target waktu pelaksanaan
--	--	---	---	--	--	---	---	---	--

				menerima pelayanan cepat dan tepat					
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

No	Indikator Implemen tasi	Pertanyaan	JAWABAN						
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI	
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintaha n Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)	
		6	Bagaimana kebijakan pemangku kepentingan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?	Kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku, namun karena peristiwa penggabungan Desa dan Kelurahan di Sidoarjo merupakan hal yang baru maka kami juga melakukan permohonan	disesuaikan dengan aturan yang berlaku	kami sesuai dengan aturan yang berlaku	disesuaikan aturan yang berlaku	dilakukan sesuai dengan aturan yang ada	Kami selalu berpatokan dengan aturan yang berlaku

No	Indikator Implemen tasi	Pertanyaan		JAWABAN					
				Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo				(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintaha n Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
				diskresi untuk beberapa kebijakan yang ada.					

		7	Apa masih terdapat program terkait dengan faslitasi permasalahan penggabungan Desa/Kelurahan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?	Proses ganti rugi untuk aset Desa dan Kelurahan oleh Pemerintah Pusat yang saat ini masih belum kejelasan waktunya	Saat ini dapat dikatakan Pemkab Sidoarjo telah melaksanakan program sesuai dengan tupoksinya, selain itu masih terdapat permasalahan ganti rugi aset Desa/Kelurahan oleh Pemerintah Pusat	Ganti rugi aset Desa/Kelurahan dampak dari kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan
--	--	---	--	--	---	--

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
		8	Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo	1. Pemahaman Masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan ini 2. Peraturan yang ada belum mengcover permasalahan di Kabupaten Sidoarjo	Sejauh ini karena permasalahan penggabungan Desa/Kelurahan karena bencana Lumpur Panas baru terjadi di Kabupaten Sidoarjo kami harus melakukan permohonan diskresi	Banyak warga yang baru mengetahui adanya penggabungan Desa dan Kelurahan, jadi terkesan kami yang menghendaki adanya kebijakan ini.	Pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum sehingga beberapa masyarakat enggan untuk menerima beberapa program dari pemerintah kabupaten Sidoarjo	

No	Indikator Implemen tasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintaha n Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
				untuk beberapa aturan terkait kebijakan selanjutnya.				

		9	Bagaimana teknis pemberhentian dan pemberian pesangon BPD pada Desa Terdampak?	Pemberhentian BPD kami lakukan karena BPD pada Desa Induk sudah terpenuhi sesuai aturan yang berlaku, untuk besaran pesangon bagi BPD pada Desa terdampak sesuai kesepakatan bersama sebesar Rp.2.500.000. dan untuk teknis di lapangan kami selalu berpatokan	Sudah dilakukan musyawarah Desa dan disepakati untuk diberhentikan dan diberi pesangon sejumlah Rp.2.500.000 dari Desa Terdampak	Kami sudah lakukan rapat bersama dan disepakati bahwa BPD Desa terdampak diberhentikan karena BPD Desa Induk sudah terpenuhi dan diberikan pesangon sesuai kesepakatan bersama	Kecamatan melakukan fasilitasi adanya musdes dan BPD yang hendak diberhentikan juga sudah setuju dengan kesepakatan bersama	sudah ada musdes untuk pemberhentian BPD dan diberikan pesangon	Musdes sudah dilaksanakan pada Desa terdampak untuk pemberhentian BPD dan diberikan pesangon sejumlah Rp.2.500.000
--	--	---	--	--	--	--	---	---	--

No	Indikator Implemen tasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
			setempat dan Desa/Kelurahan Induk dan Desa/Kelurahan Terdampak					

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
		2	Bagaimana pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur yang dilakukan oleh masing-	Berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku	telah dilaksanakan sesuai rencana aksi yang sudah ditentukan dan disepakati bersama	berjalan dengan baik dan masyarakat juga turut andil dalam implementasi program penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur	semua sesuai dengan apa yang dibahas dalam rapat bersama dan diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayah terdampak	

No	Indikator Implemen tasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintaha n Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
		masing OPD						

No	Indikator Implemen tasi	Pertanyaan	JAWABAN						
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI	
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintaha n Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)	
		3	Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Perda Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo	1. Pemahaman Masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan ini 2. Peraturan yang ada belum mengcover permasalahan di Kabupaten Sidoarjo	Sejauh ini karena permasalahan penggabungan Desa/Kelurahan karena bencana Lumpur Panas baru terjadi di Kabupaten Sidoarjo kami harus melakukan permohonan diskresi	Banyak warga yang baru mengetahui adanya penggabungan Desa dan Kelurahan, jadi terkesan kami yang menghendaki adanya kebijakan ini.	Pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum sehingga beberapa masyarakat enggan	Pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum sehingga beberapa masyarakat enggan	Pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum sehingga beberapa masyarakat enggan

No	Indikator Implemen tasi	Pertanyaan	JAWABAN						
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI	
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintaha n Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)	
				untuk beberapa aturan terkait kebijakan selanjutnya.		untuk menerima beberapa program dari pemerintah kabupaten Sidoarjo	untuk menerima beberapa program dari pemerintah kabupaten Sidoarjo	untuk menerima beberapa program dari pemerintah kabupaten Sidoarjo	
		4	Bagaimana bentuk evaluasi terhadap program tersebut?	Memastikan pemerintaha n berjalan tanpa kendala / lancar Lebih efektif, Memastikan proses	Kami memastikan kalau masyarakat menerima manfaat dari program dengan baik supaya tidak terjadi	Peninjauan melalui laporan masing-masing OPD teknis	Laporan ke sekda sebagai laporan	Kami melaporkan melalui ke Bupati melalui Bagian Pemerintaha	Kami laporkan ke Bupati melalui surat jika terdapat kendala

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangin)	(Camat Jabon)
			perubahan administrasi berjalan lancar, Memastikan penataan wilayah pada desa/kelurahan terdampak mampu menghilangkan kebingungan masyarakat atas distorsi	miskomunikasi				

No	Indikator Implemen tasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo			(Sekda Kab. Sidoarjo)	(Asisten 1 Kab. Sidoarjo)	(Kabag Pemerintaha n Setda Kab. Sidoarjo)	(Camat Porong)	(Camat Tanggulangi n)	(Camat Jabon)
			persepsi tentang wilayah, kependuduk an dll di wilayah terdampak					

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
3	Kelompok Sasaran	1 Bagaimana tanggapan mengenai program dalam implementasi Perda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur	Kebijakan yang bagus, dikarenakan perlu adanya kejelasan bagi wilayah terdampak lumpur panas Sidoarjo	Program yang sangat membantu bagi masyarakat di wilayah terdampak	Saya awalnya dan beberapa warga bingung karena takut pengaruh ke proses ganti rugi kami yang masih belum selesai, tapi sudah dijelaskan kalau tidak akan berpengaruh ke proses ganti rugi kami.	alhamdulillah akhirnya saya bisa dimasukkan ke Kelurahan Porong saat ini	Bagus dan banyak manfaat untuk warga disini	cukup baik dilakukan dengan teliti

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Informan VII	Informan VIII	Informan VI	Informan VI	Informan VII Bapak Bambang Suharto (Private Sektor) Program yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Pemerintah dan kami karena proses ganti rugi yang sudah hampir selesai.	
			Ibu Diana (warga terdampak)	Ibu Sri Utami (warga terdampak)	Bapak Ikhwan (warga terdampak)	Bapak Zainul (warga terdampak)		
			Sangat membantu bagi warga di wilayah terdampak	program yang bagus dari pemkab untuk warga disini	warga sangat terbantu dengan adanya program ini	program yang bermanfaat bagi kami warga terdampak		
		2 Apakah masyarakat mengeluarkan biaya dengan adanya program tersebut?						

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Seharusnya melihat dari keadaan dimana warga sebagai korban dari adanya kebijakan oleh pemerintah, semua biaya yang timbul dari adanya kebijakan ini harus dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten atau jika terdapat permasalahan yang lebih serius Pemerintah Pusat juga harus dilibatkan	menurut beberapa warga yang saya wawancarai pada saat liputan di lapangan masyarakat tidak mengeluarkan biaya apapun	gratis tanpa ada biaya sedikitpun	tidak ada biaya	gratis	gratis
			Informan VII	Informan VIII	Informan VI	Informan VI	Informan VII	

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Ibu Diana (warga terdampak)	Ibu Sri Utami (warga terdampak)	Bapak Ikhwani (warga terdampak)	Bapak Zainul (warga terdampak)	Bapak Bambang Suharto (Private Sektor) Tidak ada biaya	
			Gratis	Gratis	Gratis	Gratis		
3	Apakah masyarakat pada wilayah terdampak sudah terfasilitasi seluruhnya?		Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Melihat dari program yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo mulai dari Inventarisasi Aset hingga perubahan dokumen kependudukan dapat saya simpulkan bahwa saat ini Pemkab Sidoarjo sudah melakukan fasilitasi terhadap masyarakat di daerah yang terkena lumpur Sidoarjo	Sudah cukup terfasilitasi	Sudah cukup	Sudah cukup	Sudah cukup	Sudah cukup
			Informan VII	Informan VIII	Informan VI	Informan VI	Informan VII	

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Ibu Diana (warga terdampak)	Ibu Sri Utami (warga terdampak)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Bapak Zainul (warga terdampak)	Bapak Bambang Suharto (Private Sektor)	
			Sudah cukup	Sudah cukup	Sudah cukup	Sudah cukup	Beberapa permasalahan ganti rugi masih dalam proses oleh PT. Minarak Lapindo dan pemerintah pusat, namun dengan adanya penggabungan Desa/Kelurahan ini tidak menjadi hambatan dalam proses ganti rugi ini karena perubahan administrasi juga disertai dengan penambahan keterangan bahwa yang bersangkutan masih dalam proses ganti rugi	
		4 Bagaimana pelayanan kepada	Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
		masyarakat yang dilakukan oleh OPD terkait dengan implementasi program tersebut?	Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			OPD terkait sudah semestinya melakukan jemput bola sebagai langkah percepatan implementasi dari kebijakan penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak lumpur	sudah dilaksanakan dengan baik oleh OPD	sudah baik	cukup baik	sudah bagus	bagus
			Informan VII	Informan VIII	Informan VI	Informan VI	Informan VII Bapak Bambang Suharto (Private Sektor)	
			Ibu Diana (warga terdampak)	Ibu Sri Utami (warga terdampak)	Bapak Ikhwan (warga terdampak)	Bapak Zainul (warga terdampak)	Setau saya Pemkab sudah cukup baik dalam	

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			sangat membantu kami	sudah bagus	bagus		memfasilitasi Masyarakat pada wilayah terdampak	
5	Apakah terdapat hambatan dalam implementasi program tersebut?		Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)

			Kejadian penggabungan Desa/Kelurahan ini merupakan efek dari kebijakan secara top-down oleh Pemerintah Pusat yang disebabkan karena permasalahan ganti rugi yang sudah dianggap selesai oleh Kemenkopolkum juga dipengaruhi oleh kondisi politik dimana perlu adanya pemutakhiran data kependudukan. karena dari data yang ada beberapa wilayah juga dilakukan penghapusan kode wilayah. maka dari itu mungkin beberapa pengambilan kebijakan harus mendapat persetujuan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa diskresi yang diajukan Pemkab Sidoarjo	Tidak ada	tidak ada	Tidak ada	semuanya berjalan dengan baik	tidak ada hambatan
			Informan VII	Informan VIII	Informan VI	Informan VI	Informan VII	

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
			Ibu Diana (warga terdampak)	Ibu Sri Utami (warga terdampak)	Bapak Ikhwan (warga terdampak)	Bapak Zainul (warga terdampak)	Bapak Bambang Suharto (Private Sektor)	
			tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Tidak ada	Awalnya Masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya penggabungan Desa dan Kelurahan menghambat proses ganti rugi yang masih berlangsung. Namun kami dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan informasi kepada Masyarakat yang masih dalam proses ganti rugi bahwa proses ganti rugi tetap dapat dilaksanakan meskipun administrasi kependudukan mereka sudah berpindah ke Desa/Kelurahan Induk dengan disertai keterangan bahwa Masyarakat	

No	Indikator Implementasi	Pertanyaan	JAWABAN					
			Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV	Informan V	Informan VI
			Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME (Selaku Akademisi)	Candra Yudistira (selaku publikasi media)	Abdul Fattah (selaku Ormas)	Ibu Nyaris (warga terdampak)	Bapak Tajir (warga terdampak)	Bapak Rizal (warga terdampak)
							ini masih dalam proses ganti rugi.	

Lampiran 11 Perintah Revisi

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :

☐ Seminar Proposal

Nama : Akbar Prayoga
NIM : 1162200024
Hari/ Tanggal : Sabtu 6 April 2024

Catatan Perbaikan:

revisi sudah diberikan saat ujian

Surabaya,
Persetujuan Revisi/Perbaikan

Tim Penguji

Dr. Bambang Kusbandrijo, MS

Tanda/ Salah Satu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :

☐ Seminar Proposal

Nama : Akbar Prayoga
NIM : 1162200024
Hari/ Tanggal : Sabtu 6 April 2024

Catatan Perbaikan:

revisi sudah diberikan saat ujian

Surabaya,
Persetujuan Revisi/Perbaikan

Tim Penguji,


Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS

.....
Tanda/ Salah Satu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :

- ☐ Seminar Progres Report

Nama : Akbar Prayoga
NIM : 1162200024
Hari/ Tanggal : Sabtu 8 Juni 2024

Catatan Perbaikan

perubahan di bagian para implikasi
sistem di bagian

Sorabaya
Persetujuan Revisi/Perbaikan

Tim Penguji



Tanda Salah Satu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :

☐ Seminar Progres Report

Nama : Akbar Prayoga
 NIM : 1162200024
 Hari/ Tanggal : Sabtu 8 Juni 2024

Catatan Perbaikan:

- Jarak dan fotos harus
 - lengkap.

Surabaya,
 Persetujuan Revisi/Perbaikan

Tim Penguji,



..... Tandai Salah Satu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :
☐ FINALISASI

Nama : Akbar Prayoga
 NIM : 1162200024
 Hari/ Tanggal : Sabtu 29 Juni 2024

Catatan Perbaikan:

Handwritten marks on the revision sheet:

- A small curved line (hook) on the second line.
- A large checkmark on the sixth line.

Surabaya,
 Persetujuan Revisi/Perbaikan

Tim Penguji

.....Tanda Salah Satu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :
☐ FINALISASI

Nama : Akbar Prayoga
 NIM : 1162200024
 Hari/ Tanggal : Sabtu 29 Juni 2024

Catatan Perbaikan:



Surabaya,
 Persetujuan Revisi/Perbaikan

Tim Penguji

.....Tanda Salah Satu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :

□ **TESIS**

Nama : Akbar Prayoga
NIM : 1162200024
Hari/ Tanggal : Sabtu, 6 Juli 2024

Catatan Perbaikan:

Surabaya,

Tim Penguji,



Tandai Salah Satu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :

☐ TESIS

Nama : Akbar Prayoga
NIM : 1162200024
Hari/ Tanggal : Sabtu, 6 Juli 2024

Catatan Perbaikan:

- ① Abstrak -
- ② Kerangka berpikir disempurnakan
- ③. Kesimpulan dirangkum lebih kuat pd.
hasil penelitian.

Surabaya,
Persetujuan Revisi/Perbaikan

Tim Penguji,

..... Tandai Salah Satu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR REVISI

JENIS UJIAN :

☐ TESIS

Nama : Akbar Prayoga
NIM : 1162200024
Hari/ Tanggal : Sabtu, 6 Juli 2024

Catatan Perbaikan:

- Critical Review ditambahkan

Surabaya,
Persetujuan Revisi/Perbaikan



.....Tandai Salah Satu

Tim Penguji,



Lampiran 12 Hasil Check Turnitin Tesis

TURNITIN AKBAR PRAYOGA.pdf			
ORIGINALITY REPORT			
12%	12%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	setda.sidoarjokab.go.id Internet Source	4%	
2	peraturan.go.id Internet Source	3%	
3	jdih.batukota.go.id Internet Source	1%	
4	www.jogloabang.com Internet Source	1%	
5	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	1%	
6	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%	
7	barakalap.wordpress.com Internet Source	1%	
8	bappelitbangda.sulselprov.go.id Internet Source	1%	

Lampiran 13 Hasil Check Turnitin Jurnal

Implementation+of+the+Village_Kelurahan+Merger+Proces...
(1).pdf

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Mimin Sundari Nasution, Mayarni, Almasdi Syahza, Sofyan H. Siregar, Amrul Khoiri, Andri Sulityani, Eka Hariyani. "Implementation model of integrated pineapple agricultural area development program in Bukit Batu district, Bengkalis Regency, Riau Province", AIP Publishing, 2024 **2%**
Publication

2 publish.ojs-indonesia.com **1** 15
Internet Source

3 eprints.ubhara.ac.id **1%**
Internet Source

4 eudl.eu **1%**
Internet Source

5 jrssem.publikasiindonesia.id **1%**
Internet Source

6 June Ekawati, Eny Sulistyowati. "The Vulnerability of Settlements in The Areas Impacted by Lapindo Mudflow Disaster, Sidoarjo", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021 **1%**
Publication

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On

Lampiran 14 LoA Publikasi Jurnal Sinta 3



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Jalan Raya Pendidikan, Makassar

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL

ID: 3038

Jurnal Ad'minstrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran telah menerima artikel:

Nama : Akbar Prayoga, Agus Sukristyanto, Bambang Kusbandrijo
Judul : Implementation of the Village/Village Merging Process in Areas Affected by the Lapindo Mud
Instansi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diterima untuk diterbitkan**, sesuai Prosedur Penulisan Jurnal Ad'minstrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Artikel tersebut, **diterbitkan** pada Volume XI, Issue 1 Tahun 2024 (ISSN (Online): 2541-1306) dan dapat pula dilihat di melalui online, dengan alamat website:
<https://journal.unm.ac.id/index.php/administrare/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Makassar, 24 Juni 2024
Pengelola Jurnal

Sitti Hardiyanti Arhas, S.Pd., M.Pd.
Scopus ID 57212308154